

BAB II

KERANGKA TEORITIK

A. KAJIAN PUSTAKA

1. Pembangunan

Kehidupan sosial bukan merupakan barang cetakan (molded), melainkan suatu proses berkesinambungan yang selalu membaruk, bertumbuh-kembang dan berubah. Setiap gejala niscaya berada dalam keadaan "menjadi". Para pakar sosiologi menunjuk pada perubahan-perubahan mendasar dalam pola budaya, struktur dan perilaku sosial sepanjang waktu sebagai perubahan sosial. Perubahan sosial pada dasarnya merupakan proses yang dilalui oleh masyarakat sehingga menjadi berbeda dengan sebelumnya.¹¹

Seperti yang dikemukakan di atas, yang dimaksud dengan pembangunan masyarakat pesisir adalah perubahan sosial masyarakat pesisir yang dikendalikan itu dan sudah barang tentu pembangunan sebagai sosial tidak hanya menyangkut pembangunan ekonomi, melainkan menyangkut segenap aspek kehidupan masyarakat yang hidup di pesisir Gili Raja.

¹¹ Mudjia Rahardjo. *Sosiologi Pedesaan*. (Malang : UIN-Malang Press), hal. 25

Pembangunan dalam buku Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di artikan sebuah usaha dalam meningkatkan segala kemampuan baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) atau Sumber Daya Alam (SDA), hal ini dilakukan dalam rangka mensejahterakan dan memanusiakan masyarakat yang sering kali hanya dijadikan batu loncatan untuk meraih sebuah kesuksesan baik oleh masyarakat, kelompok maupun individu.¹²

Pembangunan masyarakat pada hakekatnya bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan kekuatan masyarakat baik yang berupa material maupun non-material agar dapat mempertahankan hidupnya sendiri dan orang lain.¹³

Konsep pembangunan ditujukan untuk masyarakat dan tidak hanya bermaksud membina hubungan dan kehidupan setiap orang untuk hidup bermasyarakat, melainkan juga untuk membangun masyarakat, karena setiap satuan masyarakat mempunyai kekuatan sendiri yang disebut *Community Power* oleh Nelson W, misalnya kerukunan, keakraban, solidaritas, dan kebersamaan. Community Development menjadi lebih penting lagi jika diingat bahwa masyarakat atau *community* perlu dipersiapkan untuk memasuki bentuk masyarakat yang disebut *society*, sehingga kedua bentuk ideal tersebut merupakan sebuah *continium*, *community-society continua*.

¹² Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hal 6.

¹³ Azyumardi Azra. *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : IAIN Jakarta Press. 2000), hal 137

Dalam teori-teori tentang perubahan sosial umumnya menaruh perhatian pada arah dan wujud perubahan sosial. Stewart dan Glynn (1988) berpendapat : paling tidak ada tiga pandangan tentang perubahan sosial, yaitu :

1. Teori daur ulang (cyclical theory)
2. Teori garis lurus (linear teori)
3. Teori pertentangan (conflict teori)

Menurut teori daur ulang (cyclical theory), setiap masyarakat selalu berada pada suatu titik tertentu di dalam suatu lingkaran evolusi. Setiap kemajuan dan kemunduruan selalu melalui titik-titik lain dalam lingkaran evolusi dan kembali pada kedudukan yang kurang lebih sama sebagaimana sebelumnya. Sedangkan dalam teori garis lurus (linear theory) mengatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahapan-tahapan tertentu karena kebudayaan manusia dengan sendirinya akan mengikuti suatu evolusi yang berbentuk garis lurus dan teori ini yakin bahwa perubahan sosial secara evolusioner selalu menuju keadaan yang lebih baik (linear progress). Pada teori pertentangan sangat dipengaruhi oleh pemikiran dialektika yang menurut George Hegel, dialektika ini terdiri atas tiga tahapn yaitu :

1. Tahapan tesis atau gagasan awal
2. tahapan antitesis atau gagasan penentang

3. Tahapan sintesis atau pemecahan melalui suatu pernyataan kedua gagasan yang bertentangan.¹⁴

Pembangunan masyarakat dilakukan berdasarkan 3 azas :

- a. Azas pembangunan integral adalah pembangunan yang seimbang dari semua segi-segi masyarakat (pertanian, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan sebagainya), sehingga menjamin suatu perkembangan yang selaras dan yang tidak berat sebelah. Tetapi perlu diingat bahwa untuk masa permulaan titik berat terutama harus diletakkan dalam pembangunan ekonomi.
- b. Azas kekuatan sendiri adalah : bahwa tiap-tiap usaha pertama-tama harus didasarkan pada kekuatan atau kemampuan desa itu sendiri, dengan tidak menunggu-nunggu pemberian dari pemerintah.
- c. Azas permufakatan bersama diartikan bahwa usaha pembangunan harus dilaksanakan dalam lapangan-lapangan yang benar-benar dirasakan sebagai kebutuhan oleh anggota-anggota masyarakat desa yang bersangkutan, sedangkan putusan untuk melaksanakan proyek itu bukannya berdasarkan atas perintah atasan, melainkan merupakan putusan bersama anggota masyarakat desa.¹⁵

¹⁴ Mudjia Rahardja. *Sosiologi Pedesaan*. (Malang : UIN-Malang Press. 2007). Hal. 26-27

¹⁵ Moeljarto Tjokrowinoto. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 1996, hal. 36

Azas pembangunan masyarakat desa sebagaimana dirumuskan Garis-Garis Besar Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960 pada hakekatnya memuat azas-azas yang sangat relevan untuk diterapkan pada saat ini, karena akan dapat mendukung keberlanjutan pembangunan nasional pada umumnya, dan pembangunan pedesaan pada khususnya. Azas pembangunan integral, azas kekuatan sendiri, dan azas permufakatan bersama pada hakekatnya masih mempunyai validitas untuk diterapkan pada saat ini pula.

Untuk mewujudkan desa yang mandiri, lebih dituntut adanya perubahan wawasan pembangunan, dari pada menciptakan struktur-struktur baru, ada beberapa hal yang perlu dilakukan adalah :

1. Reorientasi Birokrasi

Pembangunan untuk mewujudkan desa yang mandiri menuntut perubahan total sikap para birokrasi. Sikap sebagai penguasa sebagai *ruler* ataupun *patron* perlu ditinggalkan dan diganti sikap sebagai *fasilitator* yang fungsinya pertama-tama adalah menciptakan kondisi dan lingkungan dimana masyarakat desa dapat mengembangkan potensinya.

2. Sistem Perencanaan Melalui Informasi Komunitas

Manifestasi dari reorientasi sikap birokrasi dari sikap penguasa menjadi fasilitator adalah memberi kemampuan kepada masyarakat untuk mengenali permasalahannya sendiri yang menghambat pembangunan, mengumpulkan informasi yang relevan bagi pemecahan

masalah, merumuskan rencana yang berdasarkan atas informasi yang telah mereka analisis.

3. Mobilisasi Sumber-Sumber Sosio-kultural

Pembangunan pedesaan menuju terciptanya desa yang mandiri tidak dapat dilakukan secara uniform dan stereotipikal untuk seluruh negara. Kemandirian pelaksanaan proyek pembangunan menuntut kompatibilitas sosio-kultural dari proyek. Dengan demikian sifatnya adalah *culture spesifik*.

4. Pembinaan Jaringan Sosial

Strategi pembangunan pedesaan menuju kemandirian desa ini lebih mengutamakan interaksi dari komponen-komponen organisasi matriks yang lebih mengejawantahkan hubungan horizontal, dari pada hubungan vertikal antara rakyat yang biorokrat.

Di dalam GBHN 1993, rumusan amanat tentang pembangunan sumber daya manusia mengalami penekanan kembali yang berbunyi *"arah pembangunan jangka panjang kedua"* butir 1 yang berbunyi : *"Pembangunan jangka panjang kedua diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat indonesia agar makin maju, mandiri, dan sejahtera berdasarkan pancasila. Dalam pembangunan jangka panjang kedua, rasa cinta tanah air yang melandasi kesadaran kebangsaan, semangat pengabdian, dan tekad untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik harus terus dibangkitkan dan dipelihara sehingga berkembang menjadi sikap mental dan sikap hidup*

bermasyarakat yang mampu mendorong percepatan proses pembangunan disegala aspek kehidupan bangsa guna memperoleh persatuan dan kesatuan bangsa demi terwujudnya tujuan nasional”.

Ketidak mampuan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) adalah inti dari semua persoalan ekonomi di Indonesia. Selama pembangunan jangka panjang 25 tahun yang pertama, Indonesia hampir sama sekali melupakan pentingnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penguasaan Iptek.

Dengan kemampuan dan produktifitas yang rendah itu, maka sulit sekali cita-cita suci pembangunan nasional akan tercapai apalagi ditambah pengangguran dan kemiskinan yang semakin meningkat.

Pembangunan masyarakat semakin berbeda dari berbagai pendekatan perubahan sosial berencana lainnya, namun identitasnya sendiri masih kabur, upaya menggerakkan masyarakat dan mengorganisasikan dan mempersiapkan mereka melakukan tindakan bersama, sedangkan perencanaan sosial hanya bertujuan mempersiapkan kebijaksanaan sosial.

Masalah-masalah yang dihadapi oleh pembangunan masyarakat di dalam prakteknya antara lain :

- a. Terdapat kecederungan hanya kaum elit komunitas saja yang mampu dan berkesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan.

- b. Sampai sejauh ini, pembangunan masyarakat belum berhasil sepenuhnya dalam usahanya mendorong perubahan sosial. Memang terdapat perubahan, tetapi jarang sekali terjadi perubahan yang mendasar.
- c. Dewasa ini pembangunan masyarakat lebih berbau politik, artinya pembangunan masyarakat dijadikan alat komunikasi politik dan simbol politik.
- d. Semakin besar komunitas, semakin bervariasi kepentingannya, sehingga terdapat kepentingan yang saling bersaing atau kompetitif.
- e. Oleh karena itu pembangunan masyarakat cenderung bekerja menurut model konsensus, artinya hanya kepentingan yang sangat umum sifatnya yang diperhatikan sementara kepentingan lapisan dan kelompok masyarakat didalam komunitas terabaikan atau tersisihkan.

Pembangunan masyarakat merupakan tanggung jawab sosial yang mempunyai misi profitabilitas serta kesinambungan pertumbuhan ekonomi perlu ditempatkan seiring dan sejalan dalam harmonisasi kebutuhan tumbuh bersama antara masyarakat dan pemerintah, guna mendapatkan hasil yang optimal perlu dibangun kolaborasi melalui komunikasi dan koordinasi yang intensif antara seluruh *stake holder*.

2. Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang hidupnya di daratan laut atau di tepi pantai yang pertaniannya tergantung pada kekayaan laut lebih lanjut dikatakan bahwa masyarakat pesisir adalah sekelompok masyarakat yang berdomisi di pesisir pantai.

Pembangunan Masyarakat Pesisir Melalui Kelompok Yasinan dan Arisan yang dilakukan oleh masyarakat kepulauan Gili Raja adalah merupakan sebuah usaha masyarakat setempat yang bertujuan untuk perubahan sosial yang meliputi banyak hal diantaranya : ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta hubungan antara bangsa.

Pembangunan melalui kelompok yasinan ini di percaya oleh masyarakat dapat merubah kehidupannya akan lebih baik, tingkat kebutuhan yang tinggi menyebabkan masyarakat harus berpikir rasional dan melalui kelompok Yasinan dan Arisan ini kehidupan masyarakat pesisir Gili Raja bertumpu dan mengharap ada sebuah perubahan yang sangat signifikan baik dalam segi : *ekonomi, budaya, dan pendidikan* yang secara kasat mata masyarakat Gili Raja sangat jauh terbelakang, untuk mewujudkan itu semua masyarakat Gili Raja melalui kelompok yasinan dan arisan mampu mendirikan sebuah koperasi simpan pinjam untuk mempermudah akses kebutuhan yang menjadi kebutuhan mereka dalam sehari-hari.

Kita tahu bahwa selama ini pemanfaatan dan pengelolaan kelautan dan perikanan di kawasan pesisir selalu dihadapkan pada beberapa kendala, setidaknya ada delapan persoalan pokok yang menjadi permasalahan nyata secara berkelanjutan dimasing-masing daerah, diantaranya meliputi :

1. Over fishing, terutama diperairan pantai.
2. Pemanfaatan yang kurang maksimal diperairan lepas pantai dan laut dalam.
3. Teknologi, umumnya alat tangkap yang digunakan masih tradisional dan variasi alat tangkap kecil.
4. Sumber daya manusia, lemahnya kemampuan sumber daya manusia dan masih rendahnya keinginan menyeluruh dari pihak birokrasi untuk pengembangan perikanan.
5. Kerusakan habitat dan degradasi lingkungan.
6. Lemahnya peraturan dan penegakan hukum.
7. Kelembagaan perikanan yang belum atau tidak profesional.
8. Belum adanya tata ruang pesisir.

B. KAJIAN TEORITIK

1. Pembangunan

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, bahwa Pembangunan Masyarakat Pesisir Dalam Ritualitas Yasinan dan Arisan di Kepulauan Gili Raja Kabupaten Sumenep adalah merupakan salah satu bentuk manifestasi dari program pembangunan yang selalu gagal dilakukan oleh

pemerintah yang kemudian menyebabkan masyarakat lebih percaya kepada hal-hal yang bersifat ritual keagamaan. Sedangkan pembangunan masyarakat pesisir adalah perubahan sosial masyarakat pesisir yang dikendalikan itu dan sudah barang tentu pembangunan sosial tidak hanya menyangkut pembangunan ekonomi, melainkan menyangkut segenap aspek kehidupan masyarakat yang hidup di pesisir Gili Raja.

Pembangunan dalam buku *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat* diartikan sebuah usaha dalam meningkatkan segala kemampuan baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) atau Sumber Daya Alam (SDA), hal ini dilakukan dalam rangka mensejahterakan dan memanusiakan masyarakat yang sering kali hanya dijadikan batu loncatan untuk meraih sebuah kesuksesan baik oleh masyarakat, kelompok maupun individu.¹⁶

Pembangunan masyarakat pada hakekatnya bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan kekuatan masyarakat baik yang berupa material maupun non-material agar dapat mempertahankan hidupnya sendiri dan orang lain.¹⁷

Konsep pembangunan ditujukan untuk masyarakat dan tidak hanya bermaksud membina hubungan dan kehidupan setiap orang untuk hidup bermasyarakat, melainkan juga untuk membangun masyarakat, karena setiap satuan masyarakat mempunyai kekuatan sendiri yang disebut

¹⁶ Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hal 6.

¹⁷ Azyumardi Azra. *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : IAIN Jakarta Press. 2000), hal 137

Community Power oleh Nelson W, misalnya kerukunan, keakraban, solidaritas, dan kebersamaan. Community Development menjadi lebih penting lagi jika diingat bahwa masyarakat atau *community* perlu dipersiapkan untuk memasuki bentuk masyarakat yang disebut *society*, sehingga kedua bentuk ideal tersebut merupakan sebuah continuum, *community-society continua*.¹⁸

Semua pembangunan menyangkut bahkan ditujukan untuk masyarakat, tetapi sebagai metode, pembangunan masyarakat mempunyai karakteristik tersendiri, pembangunan masyarakat tidak saja bermaksud membina hubungan dan kehidupan setiap orang untuk hidup bermasyarakat, melainkan juga untuk membangun masyarakat karena setiap satuan masyarakat mempunyai kekuatan sendiri yang disebut *community power* misalnya, kerukunan, keakraban, solidaritas, dan kebersamaan.

Strategi pembangunan masyarakat secara umum ada empat strategi yang dapat dilakukan, meliputi :

1. *The growth strategy*

Penerapan strategi pertumbuhan ini pada umumnya dimaksudkan untuk mencapai peningkatan yang cepat dalam nilai ekonomis, melalui peningkatan pendapatan perkapita penduduk, produktivitas, pertanian, permodalan, dan kesempatan kerja yang

¹⁸ Taliziduhu Ndrah, *Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. (Jakarta : Rineka Cipta, 1990), hal. 30

diberengi dengan kemampuan konsumsi masyarakat terutama dipedesaan.

2. *The welfare strategy*

Strategi ini bisa diartikan sebagai strategi kesejahteraan yang pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi tidak dibarengi dengan pembangunan kultur dan budaya mandiri dalam diri masyarakat maka yang terjadi adalah sikap ketergantungan masyarakat kepada pemerintah.

3. *The responsitive strategy*

Strategi ini merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan yang dimaksud untuk menanggapi kebutuhan yang dirumuskan masyarakat sendiri dengan bantuan pihak luar (self need and assistence) untuk memperlancar usaha sendiri melalui pengadaan teknologi serta sumber-sumber yang sesuai bagi kebutuhan proses pembangunan.

4. *The integrated holistis strategy*

Untuk mengatasi dilema pembangunan masyarakat karena kegagalan dari ketiga strategi yang dijelaskan diatas, maka konsep kombinasi dari unsur-unsur pokok etika strategi di atas menjadi alternatif strategi.

Dalam prinsip dakwah pengembangan masyarakat yang dilanjutkan dengan merekonstruksi konsep dakwah sebagai bagian dari upaya membangun paradigma baru model dakwah pengembangan masyarakat harus mengikuti beberapa prinsip dasar yaitu :

- a. Orientasi pada kesejahteraan lahir dan batin masyarakat yang luas. Dakwah tidak dilaksanakan sekedar merumuskan keinginan sebagai masyarakat saja, tetapi direncanakan sebagai usaha membenahi kehidupan sosial bersama-sama masyarakat agar penindasan, ketidakadilan, kesewenang-wenangan tidak lagi hidup ditengah-tengah mereka. Sekala mikro kepentingan individu anggota masyarakat.
- b. Dakwah pengembangan masyarakat pada dasarnya adalah upaya melakukan *sosial engeneering* (rekayas sosial) untuk mendapatkan suatu perubahan dalam tatanan kehidupan sosial yang lebih baik. Dakwah pembangunan masyarakat merupakan suatu proses perencanaan perubahan sosial yang berlandaskan nilai-nilai silam.¹⁹

Pada saat ini, metodologi partisipasi untuk membangun desa sedang mengalami krisis. Terdapat berbagai konsep partisipasi, dari kata lain untuk mobilisasi (misalnya, partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan) sampai konsep pilihan tindakan berdasarkan kesadaran diri. Dari konsep partisipasi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi proyek pembangunan (misalnya partisipasi masyarakat untuk mengurangi biaya buruh bangunan), sampai konsep partisipasi sebagai tujuan akhir

¹⁹ Moh. Ali Aziz, A. Halim. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Metodologi*. (Yogyakarta : Pustaka Pesantren. 2007), hal. 8

pembangunan. Tidak heran kalau partisipasi tidak selalu menghasilkan keberlanjutan pembangunan, sebaliknya bisa jadi tetap menghasilkan tirani dominasi lebih lanjut.

Ada beberapa alasan mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting dalam perencanaan pembangunan, diantaranya meliputi :

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi dilapangan.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan. Karena akan mengetahui seluk beluk proyek dan merasa memiliki terhadap hasil proyek tersebut.
3. Adanya partisipasi umum dibanyak negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan.²⁰

2. Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang hidupnya di daratan laut atau di tepi pantai yang pertaniannya tergantung pada kekayaan laut lebih lanjut dikatakan bahwa masyarakat pesisir adalah sekelompok masyarakat yang berdomisili di pesisir pantai.

²⁰ Diana Conyers, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga Suatu Pengantar*. (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 1992), hal. 144

Tidak kalah pentingnya masyarakat pesisir juga seharusnya merasakan dampak dari sebuah pembangunan yang telah dilakukan, karena kalau kita mengingat sejak PELITA III, pemerintah bahkan telah bertekad untuk semakin meningkatkan gerak pembangunan di wilayah pedesaan karena hal ini mengingat sekitar 76% masyarakat Indonesia bertempat tinggal di pedesaan.

Wilayah pesisir merupakan wilayah mosaik dari ekosistem yang kaya dan sangat beragam serta merupakan sumberdaya yang sangat strategis bagi keberadaan ekonomi, sosial dan pembangunan suatu negara. Wilayah pesisir yang kaya dan sangat beragam sumberdaya sangat dipengaruhi oleh kegiatan manusia yang sangat kompleks. Disektor okonomi terjadi persaingan dalam pemanfaatan ruang dan sumberdaya di wilayah pesisir sehingga sering kali mengakibatkan pola pemanfaatan dan pembangunan yang tidak berkelanjutan.

C. PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN

Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Imron tentang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir yang dilakukan pada tahun 2007 lebih difokuskan kepada :

1. Partisipasi dan strategi dalam pengembangan ekonomi masyarakat pesisir di Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.
2. Relevansi partisipasi dan strategi pengembangan masyarakat islam.

Dari dua fokus masalah yang diangkat sehingga dapat diketahui bahwa ternyata tingkat partisipasi masyarakat setempat dalam upaya pemberdayaan dan pembangunan masyarakat pesisir sangat rendah, hal ini disebabkan

banyaknya birokrasi pemerintahan maupun lembaga swadaya masyarakat yang ikut campur dan tidak mengedepankan partisipasi masyarakat secara umum.

Sedangkan dalam penerapan strategi pemberdayaan masyarakat pesisir juga lebih bersifat *top down*, yang ini berimbas kepada hasil dari sebuah pemberdayaan masyarakat pesisir yang tidak tepat sasaran, karena tidak mengikutsertakan masyarakat yang secara umum adalah pelaksana dari sebuah pembangunan yang akan dilaksanakan.